

**KEMAMPUAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENANGANAN BENCANA LONGSOR DI  
KECAMATAN CURIO KABUPATEN  
ENREKANG**

**MUH TAUFIK ISMAIL**

**Nomor Stambuk : 105640169012**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2018**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Bencana Longsor di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

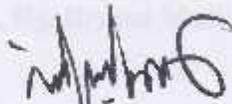
Nama : Muh. Taufik Ismail

Stambuk : 105640169012

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

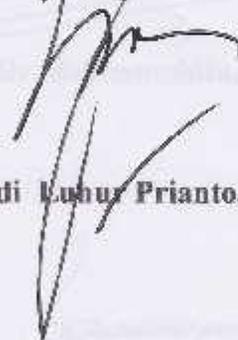
Menyetujui:

Pembimbing I



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Pembimbing II



Andi Lukur Prianto, S.IP, M.Si

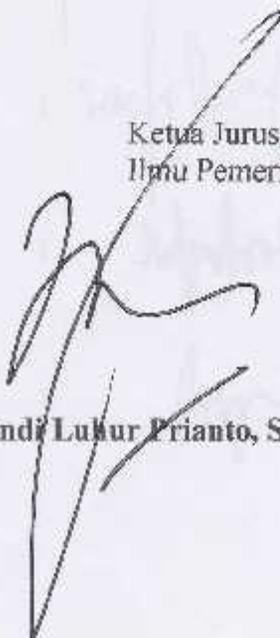
Mengetahui:

Dekan  
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan  
Ilmu Pemerintahan



Andi Lukur Prianto, S.IP, M.Si

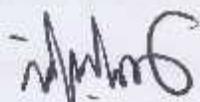
## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh TIM Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 0124/FSP/A.1-VIII/L/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Rabu tanggal 31 bulan Januari tahun 2018.

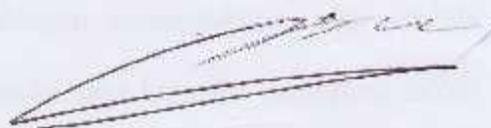
## TIM PENILAI

Ketua,

Sekretaris



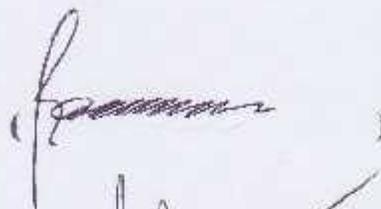
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



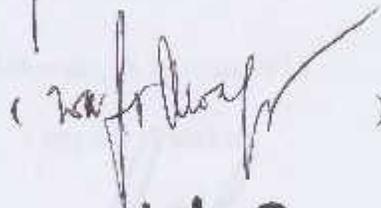
Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si

## Penguji:

1. Dr. H. Lukman Hakim, M.Si (Ketua)



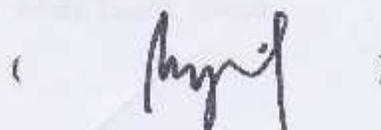
2. Dr. Anwar Parawangi, M.Si



3. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si



4. Handam, S.IP, M.Si



## ABSTRAK

**MUH. TAUFIK ISMAIL 2017,. Kapabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Bencana Longsor Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang (dibimbing oleh Ihyani Malik dan Andi Luhur Prianto).**

Tujuan penelitian ini adalah, (1) untuk mengetahui Kemampuan pemerintah daerah dalam Penanganan bencana tanah longsor di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, (2) untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana alam tanah longsor di Kabupaten Enrekang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tehnik pengumpulan data secara observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian tehnik analisis data dengan komponen sebagai berikut, pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang yaitu, (1) Memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan cara memahami hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. (2) Pengalokasian anggaran bencana daerah untuk penanggulangan bencana alam belum sepenuhnya mencukupi karena dana dengan anggaran satu milyar pertahun tersebut digunakan atas beberapa penanggulangan bencana alam yang meliputi penanggulangan tanah longsor, banjir, kebakaran, dan angin topan. (3) Pemulihan lokasi bencana dengan mengutamakan perbaikan lokasi dan fasilitas yang menjadi kebutuhan umum baik masyarakat dan pemerintah daerah. (4) pengurangan resiko bencana alam dengan membuat program dan sosialisasi tanggap darurat bencana alam seperti bangunan pondasi penahan tanah longsor. Faktor Pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor yakni, terjalinya kerjasama yang baik dari pihak Pemerintah Daerah, Dinas BPBD, Istansi terkait, dan Masyarakat, adanya program penanggulangan bencana, Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), dan Pendampingan. Faktor Penghambat yakni. Kurangnya anggaran dana, Faktor geologis, Minimnya fasilitas berupa alat penanganan bencana alam, Rusaknya fasilitas umum.

*Kata kunci : Kapabilitas, Pemerintah Daerah, Penanggulangan Bencana.*

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kapabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Bencana Longsor Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak A. Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Andi Luhur Prianto, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Kepada kedua Orang Tua dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun material.
5. Kepada Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dan Kepala Desa Parombean yang bersedia menerima saya untuk melakukan penelitian dilokasi.
7. Kepada masyarakat Desa Parombean yang bersedia memberikan informasi dilokasi penelitian.

8. Kepada sahabat, teman, dan rekan-rekan di Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Pemerintahan.
9. Segenap Keluarga Besar Himpunan Pelajar Mahasiswa Massenrenpulu (HPMM) Kabupaten Enrekang.
10. Keluarga besar HIMJIP yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dan suport dalam menyelesaikan skripsi kami.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis ucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini, semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah pada hamba-Nya, Aaamiin.

Makassar, 18 Januari 2018

Muh. Taufik Ismail

## DAFTAR ISI

Halaman Pengajuan Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah.....	iii
Abstrak .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Kapabilitas Pemerintah.....	5
B. Konsep Pemerintah Daerah.....	7
C. Faktor Terjadinya Tanah Longsor.....	14
D. Konsep Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.....	17
E. Kerangka Pikir.....	26
F. Fokus Penelitian.....	29
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	29
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Waktu dan lokasi Penelitian.....	32
B. Jenis dan tipe penelitian .....	32
C. Sumber Data.....	33
D. Informan Penelitian.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Keabsahan Data.....	35
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Objek Penelitian dan Karakteristik Informan .....	37
B. Kapabilitas Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Longsor Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang .....	52
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Longsor Di Kabupaten Enrekang .....	67
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2014.....	38
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2014.....	42
Tabel 3. Luas Desa Kecamatan Curio.....	50
Tabel 4. Informan Penelitian.....	52
Tabel 5. Kerusakan akibat tanah longsor.....	55
Tabel 6. Jumlah Pengalokasian anggaran.....	58
Tabel 5. Disaster Governance.....	63

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Bencana alam selama ini selalu dipandang sebagai sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, untuk meminimalisir terjadinya korban akibat bencana diperlukan kesadaran dan kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Kasus-kasus mengenai perubahan tata guna lahan di daerah tangkapan air hujan di hulu menjadi padat penduduk karena berubah menjadi pemukiman. Oleh karena itu di dalam proses pembangunan tidak dengan sendirinya mengurangi risiko terhadap bahaya alam.

Sebaliknya tanpa disadari pembangunan dapat menciptakan bentuk-bentuk kerentanan baru atau memperburuk kerentanan yang telah ada. Persoalan-persoalan yang muncul sebagai akibat dari proses pembangunan ini perlu diarahkan pada suatu paradigma pembangunan yang ramah lingkungan, yaitu “pembangunan yang berkelanjutan” maka pembangunan tersebut harus didasarkan atas pengetahuan yang lebih baik tentang karakteristik alam dan manusia (masyarakat). Bencana sebagai salah satu fenomena yang dapat terjadi setiap saat, secara tiba-tiba atau melalui proses yang berlangsung secara perlahan dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi kehidupan masyarakat.

Secara umum, ancaman bencana alam pergerakan tanah membayang di daerah dataran tinggi dengan kontur perbukitan. Contoh kejadian terakhir, tanah longsor menimbun ruas jalan yang menghubungkan kelurahan balla dan desa

tangru Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, kejadian ini berada di wilayah perbukitan yang tanahnya labil akibat dilanda hujan deras. Kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam tanah longsor memang tak sebanding jika dibandingkan dengan catatan kerugian bencana alam lain di Indonesia. Karena pada kenyataannya, bencana alam tanah longsor, banjir, dan kekeringan terjadi akibat ulah tangan manusia itu sendiri yang tak bisa merawat dan menjaga hutan sebagai alat utama resapan air dan pengikat tanah di lereng-lereng berbukit.

Bencana tanah longsor, yang terjadi desa parambean kecamatan curio kabupaten enrekang mengakibatkan enam dusun terisolir akibat longsor gunung lempo. Dusun le'to, dusun buntu limbong, dusun sarang, dan dusun bunga mendoe merupakan lokasi yang paling parah terkena dampak dari longsor tersebut karena jalan menuju lokasi tertimbun oleh material longsor. kurang lebih dari 50 hektar sawah dan 60 hektar perkebunan rusak dan jembatan yang menghubungkan pusat Kecamatan Curio-Parambean tertimbun longsor. Sementara itu, 300 kepala keluarga (KK) korban longsor Desa Parombean Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, harus diungsikan ke SDN 194 Parombean yang jauh dari lokasi bencana. Di lokasi pengungsian korban diberikan bantuan makanan dan peralatan lainnya seperti pakaian, selimut dan bahan bangunan untuk mengurangi penderitaan korban.

Akibat dari bencana longsor di Desa Parombean Kecamatan Curio kabupaten Enrekang kerugian yang dialami oleh masyarakat setempat berkisar dari ratusan juta, melihat dari dampak lokasi yang ditimbulkan oleh bencana

longsor tersebut, serta kerusakan rumah dan akses penghubung utama dalam mendongkrak perekonomian masyarakat yang tidak bisa dilalui.

Kabupaten Enrekang memang sangat berisiko jika terjadi bencana tanah longsor. Itu karena letak geografisnya yang sangat rentan terjadinya bencana. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang “Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Longsor Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang”.

## **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Longsor di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang?
2. Apa Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Bencana Longsor Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Kemampuan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Bencana Longsor Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
2. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dan penghambat Kemampuan Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Bencana Longsor di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

##### **a. Manfaat Akademis**

1. Menambah khazanah keilmuan pengembangan ilmu pemerintahan khususnya menyangkut Bencana Longsor Di Indonesia.
2. Sebagai bahan informasi atau referensi bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai kesamaan minat terhadap kajian ini.

##### **b. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Enrekang agar menjaga lingkungan dan alam dalam hal ini yakni jajaran pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya sekaligus tetap menjunjung loyalitas tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang aparatur pemerintahan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Kemampuan Pemerintah**

Kemampuan adalah kemampuan mengeksploitasi secara baik sumber daya yang dimiliki dalam diri maupun di dalam organisasi, serta potensi diri untuk menjalankan aktivitas tertentu ataupun serangkaian aktivitas. Ibarat individu, belum tentu seorang yang memiliki bakat, misalnya pemain piano biasa bermain piano dengan baik. Ini sangat ditentukan dengan bagaimana ia mengembangkannya dengan latihan, dan belajar. (Amir, 2011:86).

Menurut Sampurno (2011:40) kemampuan merepresentasikan seperangkat sumber terintegrasi yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas – aktivitas penting. Kemampuan atau kemampuan menyatu dalam pengetahuan dan keterampilan pekerja atau individu yang ada dalam perusahaan ataupun organisasi . Kemampuan diartikan sebagai potensi untuk menjalankan aktivitas tertentu atau serangkaian aktivitas.

Kemampuan atau kemampuan adalah berasal dari kata dasar mampu yang dalam hubungan dengan tugas dan pekerjaan berarti dapat melakukan tugas, pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan. Kemampuan dengan sendirinya juga kata sifat dan keadaan ditujukan kepada sifat atau keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas atau pekerjaan atas dasar ketentuan yang ada. Kemajuan suatu organisasi sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia.(Moenir, 1998:116).

## **1. Macam-Macam Kemampuan Pemerintah**

1. Kemampuan Ekstraktif yaitu kemampuan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemampuan SDA biasanya masih bersifat potensial sampai kemudian digunakan secara maksimal oleh pemerintah. Seperti pengelolaan minyak tanah, pertambangan yang ketika datang para penanam modal domestik itu akan memberikan pemasukan bagi pemerintah berupa pajak. Pajak inilah yang kemudian menghidupkan negara.
2. Kemampuan Distributif. yaitu SDA yang dimiliki oleh masyarakat dan negara diolah sedemikian rupa untuk dapat didistribusikan secara merata, misalkan seperti sembako yang diharuskan dapat merata distribusinya keseluruh masyarakat. Demikian pula dengan pajak sebagai pemasukan negara itu harus kembali didistribusikan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
3. Kemampuan Regulatif (pengaturan) yaitu Dalam menyelenggaran pengawasan tingkah laku individu dan kelompok maka dibutuhkan adanya pengaturan. Regulasi individu sering memunculkan benturan pendapat. Seperti ketika pemerintah membutuhkan maka kemudian regulasi diperketat, hal ini mengakibatkan keterlibatan masyarakat terkekang.
4. kemampuan simbolik, artinya kemampuan pemerintah dalam berkreasi dan secara selektif membuat kebijakan yang akan diterima oleh rakyat.

Semakin diterima kebijakan yang dibuat pemerintah maka semakin baik kemampuan simbolik sistem.

5. kemampuan responsif yaitu dalam proses politik terdapat hubungan antara input dan output, output berupa kebijakan pemerintah sejauh mana dipengaruhi oleh masukan atau adanya partisipasi masyarakat sebagai inputnya akan menjadi ukuran kemampuan responsif.
6. kemampuan dalam negeri dan internasional yaitu Sebuah negara tidak bisa sendirian hidup dalam dunia yang mengglobal saat ini, bahkan sekarang banyak negara yang memiliki kemampuan ekstraktif berupa perdagangan internasional. Minimal dalam kemampuan internasional ini negara kaya atau berkuasa (*superpower*) memberikan hibah (*grants*) dan pinjaman (*loan*) kepada negara-negara berkembang (nurfadhilahtia, 2013).

## **B. Konsep Pemerintah Daerah**

Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Ketentuan tersebut secara jelas menunjukkan bahwa di negara

kita terdapat mekanisme pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah.

### **1. Konsep Pemerintah**

Pemerintah Daerah Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Pada awal lahirnya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama (Rasyid, 2011: 13). Osborne dan Gaebler yang dikutip Rasyid (2011: 19), menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya karena itulah tugas pemerintah adalah untuk mencari cara untuk menyenangkan warganya (Rasyid 2011: 19).

Demikian dengan lahirnya pemerintahan dapat memberikan pemahaman terhadap kehadiran suatu pemerintahan merupakan manifestasi dari kehendak

masyarakat yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van Poelje dalam kutipan Hamdi (1999: 52) yang dikutip kembali Safiie (2007: 13) menegaskan bahwa pemerintahan dapat dipandang sebagai suatu ilmu yang mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum. Definisi ini menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu yang mencakup 2 (dua) unsur utama yaitu : *pertama*, masalah bagaimana sebaiknya pelayanan umum dikelola, jadi termasuk seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut kemanusiaan. *Kedua*, bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati masyarakat oleh para pengurus dengan pendekatan terbaik, masalah hubungan antara birokrasi dengan masyarakat dan permasalahan psikologi sosial (Safiie 2007: 13).

## **2. Tugas dan Fungsi Pemerintah**

Menurut Kaufman (Thoha, 1995: 101) menyatakan bahwa tugas pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi.

Sementara menurut Rasyid (2011: 13) bahwa secara umum tugas-tugas pokok pemerintah yaitu :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya perselisihan diantara masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya yang meningkatkan kesejahteraan sosial, misalnya : membantu orang tidak mampu dan memelihara orang cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dengan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat.

7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah dan hutan.

Menurut Ndraha (2001: 85) yang dikutip Safiie (2007: 16), fungsi pemerintahan terdapat ada 2 (dua) macam fungsi, yaitu :

1. Pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayan (*service*), sebagai *provider* jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan *civil* termasuk fungsi pemberdayaan, sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan. Dengan demikian, begitu luas tugas dan fungsi pemerintah, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggungjawab yang sangat besar. Untuk mengembangkan tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 2 menyatakan bahwa, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 4 menyatakan bahwa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

### **3. Peran Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Alam**

Pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Menurut undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 dan 7, Tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
3. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum;
4. Pemulihan kondisi dari dampak bencana;
5. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai;
6. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai;
7. Dan pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Peran Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

1. Penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
2. Pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
3. Penetapan status dan tingkatan bencana nasional dan daerah;
4. Penentuan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan negara lain, badan-badan, atau pihak-pihak internasional lain;
5. Perumusan kebijakan tentang penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;

6. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan;
7. Dan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang yang berskala nasional.

### **C. Faktor Terjadinya Tanah Longsor**

Tanah Longsor secara umum adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material laoporan, bergerak kebawah atau keluar lereng. Secara geologi tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi dimana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. (Nandi; 2007).

Pada prinsipnya tanah longsor terjadi bila gaya pendorong pada lereng lebih besar daripada gaya penahan. Gaya penahan umumnya dipengaruhi oleh kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Sedangkan daya pendorong dipengaruhi oleh besarnya sudut lereng, air, beban serta berat jenis tanah batuan. Proses terjadinya tanah longsor dapat diterangkan sebagai berikut : air yang meresap kedalam tanah akan menambah bobot tanah. Jika air tersebut menembus sampai tanah kedap air yang berperan sebagai bidang gelincir, maka tanah menjadi licin dan tanah pelapukan diatasnya akan bergerak mengikuti lereng dan luar lereng (Nandi; 2007).

Gejala umum tanah longsor ditandai dengan munculnya retakan-retakan dilereng yang sejajar dengan arah tebing, biasanya terjadi setelah hujan, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh serta kerikil mulai berjatuhan (Nandi; 2007).

Faktor penyebabnya antara lain :

a. Lereng Terjal

Lereng atau tebing yang terjal akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang terjal terbentuk karena pengikisan air sungai, mata air, air laut dan angin. Kebanyakan sudut lereng yang menyebabkan longsor adalah 1800 apabila ujung lerengnya terjal dan bidang longsorannya mendatar.

b. Ketinggian

Semakin tinggi maka semakin besar potensi jatuhnya tanah.

c. Curah Hujan

Musim kering yang panjang akan menyebabkan terjadinya penguapan air dipermukaan tanah dalam jumlah besar. Hal itu mengakibatkan munculnya pori-pori atau rongga tanah hingga terjadi retakan dan merekahnya tanah permukaan. Ketika hujan, air akan menyusup kebagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali dan dapat menyebabkan terjadinya longsor bila tanah tersebut terletak pada lereng yang terjal.

d. Jenis Tanah

Jenis tanah yang kurang padat adalah tanah lempung atau tanah liat dengan ketebalan lebih dari 2,5 m dari sudut lereng lebih dari 220. Tanah jenis ini memiliki potensi terjadinya tanah longsor terutama bila terjadi hujan. Selain itu tanah ini sangat retan terhadap pergerakan tanah karena menjadi lembek terkena air dan pecah ketika hawa terlalu panas.

e. Penggunaan Lahan

Tanah longsor sering terjadi di daerah tata lahan persawahan, perladangan dan adanya genangan air di lereng yang terjal. Pada lahan persawahan akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah dan membuat tanah menjadi lembek dan jenuh dengan air sehingga mudah terjadi longsor. Sedangkan untuk daerah perladangan penyebabnya adalah karena akar pohonnya tidak dapat menembus bidang longsor yang dalam dan umumnya terjadi di daerah longsor lama (Nandi; 2007).

Menurut Nurjanna, dkk (2010: 56), upaya-upaya penanggulangan bencana, yaitu :

1. Mitigasi

Mitigasi dapat juga diartikan sebagai penjinak bencana alam dan pada prinsipnya mitigasi adalah usaha-usaha baik bersifat persiapan fisik maupun non fisik dalam menghadapi bencana alam. Persiapan fisik dapat berupa penataan ruang kawasan bencana dan kode bangunan, sedangkan persiapan non fisik dapat berupa pendidikan tentang bencana alam.

2. Menempatkan korban di suatu tempat yang aman

Menempatkan korban di suatu tempat yang aman adalah hal yang mutlak dibutuhkan. Sesuai dengan deklarasi Hyogo yang ditetapkan pada Konferensi Dunia tentang Pengurangan Bencana, di Kobe, Jepang, pertengahan Januari 2005 yang lalu, menyatakan bahwa “Negara-negara mempunyai tanggungjawab utama untuk melindungi orang-orang dan harta benda yang berada dalam wilayah kewenangan dari ancaman dengan memberikan prioritas yang tinggi kepada pengurangan resiko bencana dalam kebijakan nasional, sesuai dengan kemampuan

mereka dan sumber daya yang tersedia kepada mereka”, seperti :

- a. Membentuk Tim Penanggulangan Bencana.
- b. Memberikan penyuluhan-penyuluhan.
- c. Merelokasi korban secara bertahap.

Menurut Ramli (2010: 56), upaya-upaya pencegahan ancaman alam yaitu

1. Membuat Pos Peringatan Bencana

Salah satu upaya yang kemudian dapat diupayakan adalah dengan mendirikan pos peringatan bencana, pos inilah yang nantinya menentukan warga masyarakat bisa kembali menempati tempat tinggalnya atau tidak.

2. Membiasakan Hidup Tertib dan Disiplin

Perlu pola hidup tertib, yaitu dengan menegakkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pelestarian lingkungan hidup. Asal masyarakat menaatinya, berarti setidaknya kita telah berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan dan masyarakat juga harus disiplin.

3. Memberikan Pendidikan tentang Lingkungan Hidup

Faktor ini telah dipertegas dalam Konferensi Dunia tentang Langkah Pengurangan Bencana alam, yang diselenggarakan lebih dari dasawarsa silam, 23-27 Mei 1994 di Yokohama, Jepang. Forum ini, pada masa itu merupakan forum terbesar tentang bencana alam yang pernah diselenggarakan sepanjang sejarah. Tercatat lebih dari 5.000 peserta hadir yang berasal dari 148 negara.

#### **D. Konsep Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana**

Dengan mengacu kepada UU 24/2007 Sugeng Triutomo menjelaskan tentang proses dan peran berbagai pihak dalam penyelenggaraan PB. Disini

bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Secara umum faktor penyebab terjadinya bencana adalah karena interaksi antara ancaman (*hazard*) dan kerentanan (*vulnerability*). Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (13) tentang Penanggulangan Bencana, Ancaman Bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Sedangkan pada ayat (14), kerentanan terhadap dampak atau resiko/rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi suatu masyarakat pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Menurut Paripurno (2011), bahwa sumber ancaman bencana dapat dikelompokkan ke dalam empat sumber ancaman, yaitu :

1. Sumber ancaman Klimatologis, adalah sumber ancaman yang ditimbulkan oleh pengaruh iklim, dapat berupa rendah dan tingginya curah hujan, tinggi dan derasnya ombak di pantai, arah angin, serta beberapa kejadian alam lain yang sangat erat hubungannya dengan iklim dan cuaca. Contoh : banjir, kekeringan, petir, abrasi pantai dan badai.

2. Sumber ancaman Geologis, adalah sumber ancaman yang terjadi oleh adanya dinamika bumi, baik berupa pergerakan lempeng bumi, bentuk dan rupa bumi, jenis dan materi penyusunan bumi, adalah beberapa contoh kondisi dan dinamika bumi. Contoh : letusan gunung api, gempa bumi, tsunami dan tanah longsor.
3. Sumber ancaman industri dan kegagalan teknologi, adalah sumber ancaman akibat adanya kegagalan teknologi maupun kesalahan pengelolaan suatu proses industri, pembuangan limbah, polusi yang ditimbulkan atau dapat pula akibat proses persiapan produksi. Contoh : kebocoran reaktor nuklir, pencemaran limbah dan semburan lumpur.
4. Faktor manusia juga merupakan salah satu sumber ancaman. Perilaku atau ulah manusia, baik dalam pengelolaan lingkungan, perebutan sumber daya, permasalahan ras dan kepentingan lainnya serta akibat dari sebuah kebijakan yang berdampak pada sebuah komunitas pada dasarnya merupakan sumber ancaman. Contoh : konflik bersenjata dan penggusuran.

Dampak bencana adalah akibat yang timbul dari kejadian bencana. Dampak bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, kerusakan pada infrastruktur/aset, lingkungan/ekosistem, harta benda, penghidupan, gangguan pada stabilitas sosial, ekonomi, politik, hasil pembangunan dan dampak lainnya yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Besar kecilnya dampak bencana tergantung pada tingkat ancaman (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*) dan kapasitas/kemampuan (*capacity*) untuk menanggulangi

bencana. Semakin besar ancaman bencana, maka semakin besar peluang dampak yang ditimbulkan akibat bencana dan semakin tinggi tingkat kerentanan terhadap bencana, semakin besar peluang dampak yang ditimbulkan bencana.

Demikian pula, semakin rendah kemampuan dalam menanggulangi bencana, semakin besar peluang dampak yang timbul akibat bencana. Kerentanan dan kapasitas/kemampuan adalah analog dengan dua sisi mata uang. Untuk menurunkan (tingkat) kerentanan dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas/kemampuan. Dengan kata lain, meningkatnya kapasitas/kemampuan akan dapat menurunkan (tingkat) kerentanan (fisik, ekonomi, sosial dan lingkungan). Besar dampak bencana juga dipengaruhi oleh waktu datangnya kejadian bencana yaitu bencana yang datangnya secara tiba-tiba dan bencana yang terjadisecara perlahan- lahan.

Menurut Benson dan Clay (2004) yang dikutip Supriyatna (2011), dampak bencana dibagi 3 (tiga) antara lain :

1. Dampak Langsung, meliputi kerugian finansial dari kerusakan aset ekonomi, misalnya rusaknya bangunan seperti tempat tinggal dan tempat usaha, infrastruktur, lahan pertanian dan sebagainya.
2. Dampak tidak langsung, meliputi berhentinya proses produksi, hilangnya output dan sumber penerimaan.
3. Dampak sekunder atau dampak lanjutan (*secondary impact*). Contoh: terhambatnya pertumbuhan ekonomi, terganggunya rencana pembangunan yang telah disusun, meningkatnya defisit neraca pembayaran, meningkatnya angka kemiskinan dan lain-lain.

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, terdapat hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Didalam Undang-Undang tersebut tidak dikenal istilah Manajemen Bencana (*Disaster Management*), melainkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang dalam bahasa Inggris juga disebut *Disaster Management*.

Secara garis besar, materi yang terkandung dalam undangundang tersebut meliputi tahapan penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui tiga fase/tahapan beserta kegiatannya, perencanaan dan pendanaan serta peran lembaga kebencanaan dengan kewenangan menjalankan fungsi koordinasi, komando dan pelaksanaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 juga mengamanatkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana (*Disaster Management Plan*). Sistem Nasional Penanggulangan Bencana yang dibangun berdasarkan undang-undang terdiri dari lima (5) sub sistem, yaitu :

a. Legitimasi

Legitimasi berkaitan dengan peraturan perundanganundangan dari tingkat nasional sampai dengan daerah, bahkan hingga tingkat masyarakat/komunitas. Arti penting legitimasi antara lain :

- 1). Menyusun rencana, membentuk kelembagaan, melakukan tindakan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan lain-lain.

- 2). Menempatkan tanggungjawab secara formal sehingga mempermudah dalam pelaksanaan tanggungjawab dan memberikan perlindungan dari negara/rakyat dari bencana.
- 3). Meningkatkan peran aktif bagi individu dan organisasi/lembaga dalam penanggulangan bencana.
- 4).Melakukan tindakan yang diperlukan bagi individu atau organisasi/lembaga yang terkena dampak bencana.

b. Kelembagaaan

Lembaga bencana dibentuk secara permanen ditingkat pusat dan daerah yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan kerja baik secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal terkait hubungan dengan lembaga lain yang bersifat koordinasi yang dilakukan pada fase prabencana dan pasca bencana. Sedangkan hubungan secara vertikal bersifat komando di tingkat pusat. Termasuk penerapan *Incident Command System (ICS)* dilokasi bencana yang dilaksanakan pada situasi darurat bencana.

c. Perencanaan

Perencanaan terkait dengan penanggulangan bencana ke dalam perencanaan pembangunan (nasional dan daerah) dan rencana aksi (nasional/daerah) dalam pengurangan resiko bencana. Perencanaan ditetapkan oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah (sesuai wewenangnya), yang penyusunannya dikoordinasikan oleh BNPB/BPBD. Hal tersebut dilakukan melalui penyusunan data tentang resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program/kegiatan

penanggulangan bencana. Rencana tersebut ditinjau secara berkala oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

d. Pendanaan

Pendanaan penanggulangan bencana berkaitan dengan penyediaan dan pengaturan dana untuk penanggulangan bencana, berupa :

- 1). Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), (APBN/APBD) untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional lembaga terutama untuk kegiatan pengurangan resiko bencana.
- 2). Dana Kontinjensi yang digunakan untuk penanganan kesiapsiagaan (sedang diperjuangkan agar penggunaannya didukung dengan kemudahan akses)
- 3). Dana Siap Pakai untuk bantuan kemanusiaan (*relief*) pada saat terjadi bencana atau pada saat dinyatakan kondisi darurat.
- 4). Dana pemulihan pasca bencana dialokasikan untuk rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana di daerah.
- 5). Bantuan masyarakat, bisa berasal dari masyarakat dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan bantuan dari dunia usaha/sector swasta sebagai wujud tanggungjawab sosial, yang didalamnya termasuk untuk penanggulangan bencana.

e. Peningkatan Kapasitas

Peningkatan kapasitas berkaitan dengan program/kegiatan meningkatkan/membangun kapasitas bangsa/masyarakat yang memiliki kapasitas untuk tangguh menghadapi ancaman bencana. Sasaran akhirnya adalah masyarakat

harus mampu mengantisipasi, siap siaga menghadapi bencana, mampu menangani kedaruratan (minimal mampu menolong diri sendiri/keluarga) dan mampu bangkit kembali dari dampak bencana. Banyak program/kegiatan yang dapat dilakukan, antara lain :

- a. Sosialisasi penanggulangan bencana melalui media massa.
- b. Pelatihan manajemen bencana (pencegahan, penanganan dan pemulihan).
- c. Kepedulian terhadap cara-cara mitigasi yang dapat diterapkan dan keikutsertaan masyarakat dalam program kesiapan/kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam merespons persoalan bencana di Indonesia, termasuk untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penanggulangan bencana. Kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan program penanggulangan bencana. Secara umum kebijakan nasional penanggulangan bencana dituang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, serta Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pada tingkat pusat pemerintah telah membentuk lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana yaitu

BNPB. BNPB adalah lembaga non kementerian yang memiliki tugas pokok penanggulangan bencana pada tingkat nasional, sedangkan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh BPBD.

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 12 tentang Penanggulangan Bencana menjelaskan bahwa BNPB mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan.
3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan pada setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional.
6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.

8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Dalam tugas tersebut, BNPB menyelenggarakan fungsi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 13 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu : (1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. (2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Sedangkan pada Pasal 18 ayat (2), pemerintah daerah membentuk BPBD, yang terdiri dari : (a) Badan pada tingkat provinsi yang dipimpin oleh pejabat setingkat di bawah gubernur, dan (b) Badan pada tingkat kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/walikota.

#### **E. Kerangka Pikir**

Kemampuan pemerintah daerah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas suatu daerah maupun instansi tertentu. Oleh karena itu, satuan unit yang bekerja khusus dalam bidang pekerjaan tertentu seperti penanggulangan bencana alam harus bekerja dengan disiplin, efisien dan efektif. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil apabila telah bekerja dan hasil kinerjanya dapat dirasakan oleh masyarakat yang ada di daerahnya.

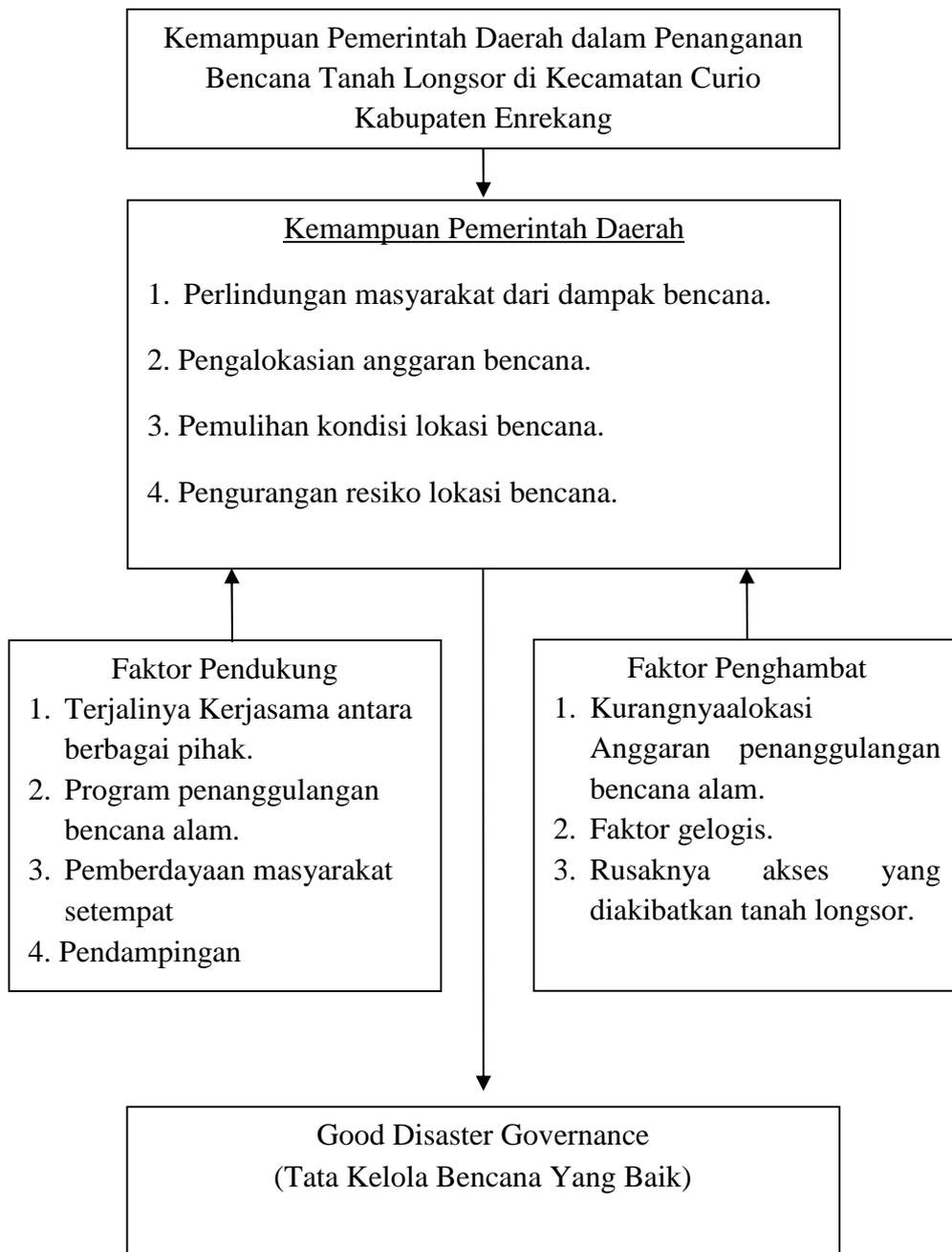
Tidak terlepas dari itu penulis dalam penelitian ini, ingin mengungkapkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah Kecamatan Curio dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat dari dampak bencana alam baik yang

telah terjadi maupun yang belum terjadi. Tak luput dari membahas perlindungan terhadap masyarakat, penulis dalam penelitian ini juga akan membahas mengenai anggaran dana bencana alam yang disediakan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam menanggulangi bencana alam.

Penulis dalam penelitian ini juga membahas kemampuan pemerintah daerah Kecamatan Curio untuk pemulihan lokasi bencana alam, dan pengurangan resiko lokasi bencana alam.

Disamping empat (4) aspek yang berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah Kecamatan Curio dalam menanggulangi bencana alam penulis dalam penelitian ini juga membahas faktor pendukung dan penghambat pemerintah dalam melakukan penanggulangan bencana alam. Faktor pendukung, seperti Terjalinya Kerjasama antara berbagai pihak, Program penanggulangan bencana alam, Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), Pendampingan. diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dalam menanggulangi bencana alam.

Disamping faktor pendukung ada faktor penghambat yang menjadi kendala pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dalam melakukan/ menanggulangi bencana alam misalnya, seperti Anggaran bencana alam, Faktor geologis, Fasilitas penanggulangan bencana alam, Rusaknya akses yang diakibatkan tanah longsor.

**BAGAN KERANGKA PIKIR**

## **F. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah, pada kemampuan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana longsor yang terjadi di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang : (a) Kemampuan Pemerintah Kecamatan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak bencana. (b) Pengalokasian anggaran bencana alam tanah longsor di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang. (c) Pemulihan kondisi lokasi bencana oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Curio. (d) Pengurangan resiko lokasi bencana oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Curio. (e) Faktor pendukung dan penghambat Kemampuan oleh Pemerintah Daerah Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dalam menanggulangi bencana longsor.

## **G. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan kerangka pikir sebelumnya maka dapat dikemukakan deskripsi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana alam yang dimaksud adalah :
  1. Kemampuan pemerintah daerah Kecamatan Curio dalam melakukan tindakan yang tepat sasaran, dalam menanggulangi bencana alam tanah longsor yang dapat mengancam keselamatan masyarakat di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.
  2. Kemampuan pemerintah daerah Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang dalam menanggulangi bencana alam sedini mungkin, memberikan bantuan seperti sandang dan pangan, obat-obatan, dan penanganan darurat sesegera mungkin kepada korban tanah longsor.

2. Pengalokasian anggaran bencana alam yang dimaksud adalah :
  - a. Pengalokasian anggaran dana yang disiapkan pemerintah daerah Kecamatan Curio dalam menanggulangi bencana alam tanah longsor.
3. Pemulihan kondisi lokasi bencana alam yang dimaksud adalah :
  - a. Kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dalam memulihkan lokasi bencana alam seperti membersihkan sisah tanah longsor yang menutupi jalanan, memperbaiki sarana prasarana yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti saluran air bersih, dan listrik yang terpurus yang diakibatkan oleh tanah longsor.
4. Pengurangan resiko lokasi bencana alam yang dimaksud adalah :
  - a. Kemampuan pemerintah daerah Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang dalam mengurangi lokasi bencana alam yaitu dengan membangun dinding penahan tanah longsor, sosialisasi anti bencana alam, monitoring lokasi rawan bencana tanah longsor, program penghijauan yang dilakukan masyarakat dalam mencegah terjadinya tanah longsor, dan pembentukan komunitas tentang penanggulangan bencana alam yang dibentuk oleh masyarakat di Desa Parombean.
5. Faktor pendukung yang dimaksud adalah :
  - a. Terjalinya Kerjasama yang baik antara pihak, Pemerintah Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang, Dinas BPBD, Istansi terkait, dan Masyarakat.

- b. Program penanggulangan bencana alam, yang dimaksudkan yaitu, berupa pembangunan tanggul penahan tanah longsor, penghijauan, dan sosialisasi tentang bencana tanah longsor.
  - c. Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) yang dimaksud adalah meningkatkan nilai pemahaman kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana alam.
  - d. Pendampingan yang dimaksud adalah : pemerintah aktif dalam memantau perkembangan program penanggulangan bencana alam yang diberikan kepada masyarakat.
6. Faktor penghambat yang dimaksud adalah :
- a. Anggaran bencana alam yang dimaksud adalah : kurangnya anggaran dana yang disediakan pemerintah daerah Kabupaten Enrekang dalam menanggulangi bencana alam.
  - b. Faktor geologis yang dimaksud adalah : kondisi alam kabupaten enrekang yang 85% wilayahnya terdiri dari pegunungan.
  - c. Fasilitas penanggulangan bencana alam yang dimaksud adalah : kurangnya alat seperti, beco, skapator yang dapat membantu penanggulangan bencana alam.
  - d. Rusaknya akses yang diakibatkan tanah longsor, berupa tertimbunnya jalan, dan jembatan yang akan dilalui saat akan melakukan penanggulangan bencana alam.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan selama dua bulan berlokasi di Kantor Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini dilakukan karena untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah tentang penanggulangan resiko bencana tanah longsor di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan adalah penekanan pada observasi wawancara untuk orang, sebagai lawannya adalah gambaran kondisi objektif secara ilmiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskripsi kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum berbagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif, sedangkan dasar penelitiannya adalah *survey* yakni tujuan dari penelitian deskripsi ini adalah menggambarkan mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari kondisi bencana di Kabupaten Enrekang.

### C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini penulis menggunakan data yang menurut penulis sesuai dengan objek penelitian sehingga dapat memberikan gambaran langsung terhadap objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan, antara lain :

1. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dan hasil wawancara dari beberapa informan, serta dokumentasi dan observasi atau pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti bersumber dari bahan bacaan atau dokumentasi yang berhubungan dengan objek penelitian. Data sekunder diantaranya buku paket, jurnal, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah diteliti.

### D. Informan Penelitian

Informan merupakan sasaran objek peneliti yang akan menjadi sumber informasi dalam pengumpulan data-data primer melalui proses observasi dan wawancara lapangan. Target peneliti yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah betul-betul warga yang terlibat langsung dalam kejadian bencana. Dalam hal ini yang dimaksud adalah :

NO	INFORMAN	JUMLAH
1.	Pemerintah Kecamatan Curio	1 Orang
2.	Kepala BPBD Kab. Enrekang	1 Orang
3.	Pemerintah Desa Parombean	1 Orang
4.	Masyarakat Korban Bencana	5 Orang

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik penelitian merupakan salah satu unsur penting dalam melakukan suatu penelitian. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yang digunakan dalam meneliti adalah :

- a. Observasi, adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap obyek penelitian.
- b. Wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, artinya peneliti mengadakan pertemuan langsung dengan informan, dan wawancara bebas artinya peneliti bebas mengajukan pertanyaan kepada informan sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.
- c. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data-data tulisan, baik itu dokumen maupun arsip-arsip lainnya, dan dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah langkah selanjutnya untuk mengelolah data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Teknik analisis data yang terdapat komponen pokok, menurut Miles dan Huberman yang dikutip Sugiono (2007: 49), keempat komponen tersebut yaitu :

### 1. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

### 2. Reduksi data

Reduksi data merupakan komponen pertama analisis data yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan peneliti dapat dilakukan.

### 3. Sajian data

Sajian data merupakan suatu rangkaian informasi yang memungkinkan kesimpulan secara singkat dapat berarti cerita sistematis dan logis makna peristiwanya menjadi dipahami.

### 4. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti apa arti dan hal-hal yang ditemui dengan mencatat peraturan-peraturan sebab akibat dan berbagai proporsi sehingga penarikan kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.

## **G. Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, (Sugiyono 2006), menjelaskan ada tiga macam triangulasi. Ketiga triangulasi tersebut yaitu triangulasi sumber, pengumpulan data, dan waktu.

Penjelasan dari ketiga triangulasi akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber adalah triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
2. Triangulasi teknik adalah suatu alat untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang sama namun dengan alat yang berbeda.
3. Triangulasi waktu adalah triangulasi waktu yang sering mempengaruhi data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi, siang, maupun malam hari akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

Penelitian ini menggunakan tiga macam triangulasi, pertama triangulasi sumber berupa informan penelitian dari pihak Pemerintah Kecamatan, pemerintah desa, Dinas BPBD Kabupaten Enrekang, dan Masyarakat di Kabupaten Enrekang. Kedua triangulasi teknik yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga triangulasi waktu berupa waktu yang digunakan saat melakukan penelitian berupa tanggal penelitian dilokasi penelitian.

## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian dan Karakteristik Informan**

##### **1. Deskripsi Kabupaten Enrekang**

###### **a. Keadaan Geografis**

Kabupaten Enrekang secara geografis terletak antara 3 14'36''- 3 50'00'' Lintang Selatan dan antara 109 40'53'' - 110 6'33'' Bujur Timur. Letak geografis Kabupaten Enrekang berada di jantung jazirah Sulawesi Selatan yang dalam peta batas wilayah memang bentuknya seperti jantung. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Toraja
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Sidrap
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Pinrang

###### **b. Luas Wilayah**

Secara keseluruhan Kabupaten Enrekang memiliki Wilayah seluas 1.786,01 km<sup>2</sup>. Jika dibandingkan luas wilayah Sulawesi Selatan, maka luas wilayah Kabupaten Enrekang sebesar 2,83 %.

Kabupaten Enrekang terbagi menjadi 12 kecamatan dan secara keseluruhan terbagi lagi dalam satuan wilayah yang kecil yaitu terdiri atas 129 wilayah desa/kelurahan.

**TABEL 1 : Luas daerah menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2010**

No.	Nama Kecamatan	Luas Area (km <sup>2</sup> )	Persentase Terhadap Luas Enrekang (%)
1.	Maiwa	392,87	22,00
2.	Bungin	236,84	13,26
3.	Enrekang	291,19	16,30
4.	Cendana	91,01	5,10
5.	Baraka	159,15	8,91
6.	Buntu Batu	126,65	7,09
7.	Anggeraja	125,34	7,02
8.	Malua	40,36	2,26
9.	Alla	34,66	1,94
10.	Curio	178,51	9,99
11.	Masalle	68,35	3,83
12.	Baroko	41,08	2,30
Kabupaten Enrekang		1,786,01	100

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2010, BPS Enrekang

Dari tabel, terlihat bahwa kecamatan Maiwa memiliki daerah terluas yakni sebesar 392,87 km<sup>2</sup> (22%) sedangkan yang terkecil; adalah kecamatan Alla sebesar 34,88 km<sup>2</sup> (1,94%).

### **c. Topografi**

Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang pada umumnya mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 47 - 3.293 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara umum keadaan Topografi Wilayah wilayah didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 15,04%. Musim yang terjadi di Kabupaten Enrekang ini hampir sama dengan musim yang ada di daerah lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan yaitu musim hujan dan musim kemarau dimana musim hujan terjadi pada bulan November - Juli sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Agustus - Oktober.

Selama setengah dasawarsa terakhir telah terjadi perubahan wilayah administrasi pemerintahan baik pada tingkat kecamatan maupun level desa/kelurahan. Pada Tahun 1995 di Kabupaten Enrekang hanya terdapat 54 desa/kelurahan yang tersebar pada 5 kecamatan. Dengan adanya perubahan situasi dan kondisi wilayah, maka pemekaran desa/kelurahan sudah menjadi keharusan. Maka pada tahun 1997, jumlah desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Enrekang telah bertambah dari 78 desa/kelurahan kondisi tahun 1996, menjadi 108 desa/kelurahan. Demikian halnya pada tingkat kecamatan, yang semula hanya 5 kecamatan menjadi 9 kecamatan. Pada pertengahan tahun 2003 terjadi pemekaran sehingga bertambah lagi sebanyak 3 desa menjadi 111 desa/kelurahan. Kemudian pada akhir tahun 2006 terjadi pemekaran desa dan

kecamatan menjadi 11 kecamatan dan 112 desa/kelurahan. Terakhir pada tahun 2008 mekar kembali menjadi 12 kecamatan dan 129 desa/kelurahan. Dari 12 Kecamatan tersebut, kecamatan terluas adalah Kecamatan Maiwa yaitu 392,87 km<sup>2</sup> atau 22 persen dari luas Kabupaten Enrekang , sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Alla yaitu 34,66 km<sup>2</sup> atau 1,94 persen dari luas Kabupaten Enrekang.

Pegunungan Latimojong yang memanjang dari arah utara ke Selatan rata-rata ketinggian sekitar 3000 meter di atas permukaan laut, memagari kabupaten enrekang di sebelah timur sedang di sebelah barat membentang sungai Saddang yang berada dalam wilayah Kabupaten Pinrang dengan aliran pengairan sampai Kabupaten Sidrap.

Ditinjau dari kerangka pengembangan wilayah maupun secara geografis Kabupaten Enrekang juga dapat dibagi kedalam dua kawasan yaitu Kawasan Barat Enrekang (KBE) dan Kawasan Timur Enrekang (KTE). KBE meliputi Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Enrekang dan Kecamatan Cendana, sedangkan KTE meliputi Kecamatan Curio, Kecamatan Malua, Kecamatan Baraka, Kecamatan Bungin dan Kecamatan Maiwa. Luas KBE kurang lebih 659,03 Km<sup>2</sup> atau 36,90% dari Luas Kabupaten Enrekang sedangkan luas KTE kurang lebih 1.126,98 Km<sup>2</sup> atau 63,10% dari, Luas wilayah Kabupaten Enrekang.

Dilihat dari aktifitas perekonomian, tampak ada perbedaan signifikan antara kedua wilayah tersebut. Pada umumnya aktifitas perdagangan dan industri

berada pada wilayah KBE. Selain itu industri jasa seperti transportasi, telekomunikasi, hotel, restoran, perbankan, perdagangan industri pengolahan hash pertanian berpotensi dikembangkan di wilayah tersebut. Sedangkan KTE yang selama ini dianggap relatif tertinggal bila dilihat dari ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi, sangat memadai dari segi potensi SDA, sehingga amat potensial untuk pengembangan pertanian dalam arti yang luas yaitu pertanian tanaman pangan/ hortikultura, perkebunan dan pengembangan hutan rakyat.

Pemekaran dari lima kecamatan menjadi sembilan kecamatan di Kabupaten Enrekang menyebabkan akses penduduk terhadap pelayanan pemerintahan lebih mudah dicapai. Kondisi ini dipermudah oleh semakin dekatnya pusat pemerintahan kecamatan dari desa-desa bawahannya. Selain itu jumlah penduduk beserta aktifitasnya yang akan ditangani . setiap wilayah kecamatan semakin berkurang. Pemekaran ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan roda pemerintahan sehingga akan memberikan efek positif terhadap akselerasi pembangunan di setiap wilayah.

Kawasan Timur Enrekang yang memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensinya memberi peluang untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta tanaman perkebunan dan kehutanan. Adanya keterbatasan akses KTE terhadap Kawasan Barat Enrekang mengindikasikan perlunya kebijakan atau langkah langkah strategis yang memungkinkan kedua wilayah tersebut dapat bersinergi untuk menuju pencapaian visi dan misi daerah.

#### d. Kependudukan

Jumlah penduduk di Kabupaten Enrekang untuk tahun 2008 adalah sebanyak 188.070 jiwa yang tersebar di 12 kecamatan.

Dengan kepadatan penduduk mencapai 105 jiwa/km<sup>2</sup>.

**Tabel 2 : Penduduk menurut jenis kelamin dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Enrekang Tahun 2010**

No.	Nama Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total	Kepadatan Penduduk
1.	Maiwa	11.655	11.657	23.312	59,3
2.	Bungin	2.284	2.098	4.382	18,5
3.	Enrekang	14.928	14.929	29.857	102,5
4.	Cendana	4.269	4.420	8.689	95,5
5.	Baraka	10.495	10.287	20.782	130,6
6.	Buntu Batu	6.097	5.896	11.933	94,7
7.	Anggeraja	11.866	11.850	23.716	189,2
8.	Malua	4.275	4.322	8.597	213,0
9.	Alla	10.107	10.046	20.153	581,4
10.	Curio	7.248	7.094	14.342	80,3
11.	Masalle	6.145	5.953	12.098	177,0
12.	Baroko	5.184p	4.965	10.149	247,1
Kabupaten Enrekang		94.553	93.517	188.070	105.3

Sumber : Kabupaten Enrekang Dalam Angka 2010 BPS Enrekang

Berdasarkan tabel Kecamatan Enrekang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak jika di bandingkan dengan kecamatan yang lain yaitu sebesar 29.857 jiwa. Hal ini dimungkinkan karena kecamatan ini berada di ibu kota Kabupaten dengan penduduk yang heterogen. Adapun kecamatan dengan penduduk yang paling sedikit yaitu kecamatan Bungin dengan jumlah penduduk sebesar 4.382 jiwa dan merupakan kecamatan yang baru dimekarkan.

#### **e. Pemerintahan**

Kabupaten Enrekang telah beberapa kali mengalami pergantian bupati sejak awal mula terbentuknya yaitu pada tanggal 1960. Adapun Bupati yang pernah memegang tumpuk pemerintahan di Kabupaten ini adalah :

1. Periode 1960-1963 dijabat oleh Andi Baba Mangopo
2. Periode 1963-1964 dijabat oleh M. Nur
3. Periode 1964-1965 dijabat oleh M. Chatif Lasiny
4. Periode 1965-1969 dijabat oleh Bambang Soetrisna
5. Periode 1969-1971 dijabat oleh Abd. Rachman, BA
6. Periode 1971-1978 dijabat oleh Much. Daud ( $\pm$  Tahun masa non aktif, dan Pjs. Oleh Drs. A. Parawansa)
7. Periode 1978-1983 dijabat oleh H. Abdullah Dollar, BA
8. Periode 1983-1988 dijabat oleh M. Saleh Nurdin Agung
9. Periode 1988-1993 dijabat oleh H.M. Amien Syam
10. Periode 1993-1998 dijabat oleh H. Andi Rahman
11. Periode 1998-2003 dijabat oleh Drs. H. Iqbal Mustafa

12. Periode 2003-2008 dijabat oleh Ir. Haji La Tinro La Tunrung
13. Periode 2008- dijabat oleh Ir. Haji La Tinro La Tunrung
14. Periode 2013- sekarang dijabat oleh Drs. H. Muslimin Bando, M.Pd.

Kabupaten Enrekang mempunyai visi sebagaimana yang tertuang dalam rencana strategi Pemerintah Kabupaten yaitu “Kabupaten Enrekang sebagai daerah agropolitan yang mandiri, berkelanjutan dan bewawasan lingkungan”.

Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Enrekang sebagai daerah yang cukup potensial, dilihat dari segi sumber daya alam, tingkat aksesibilitas, dukungan sarana dan prasarana, sesungguhnya memungkinkan untuk mencapai daerah agropolitan, dimana pola pengembangan daerah berbasis pada pengembangan sector pertanian (*Resourch based Strategy*).

Dengan berkembangnya sektor pertanian selanjutnya akan memberikan efek eksternal terhadap tumbuh kembangnya berbagai sektor lainnya, seperti industry pengolahan, perdagangan, lembaga keuanan, dan sebagainya.

2. Pengembangan daerah agropolitan di maksud harus tetap mengacu pada prinsip otonomi dan kemandirian melalui pengembangan interkoneksi antar daerah baik di Sulawesi Selatan maupun daerah luar Sulawesi Selatan.
3. Pembangunan daerah harus dipandang dalam perspektif masa depan sehingga pelaksanaan pembangunan akan selalu di tempatkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Kerangka pembangunan seperti

itu akan menempatkan aspek kelestarian lingkungan sebagai persyaratan utama.

4. Muara dari pembangunan daerah adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Namun kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang ingin diwujudkan tidak hanya dipandang dari aspek fisik saja, tetapi juga mencakup aspek spiritual keagamaan dan budaya Massenrempulu. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dilakukan melalui penguatan sektor ekonomi, sektor wilayah, perluasan basis ekonomi masyarakat melalui pengembangan Kawasan Timur Enrekang (KTE), penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat melalui Lembaga Ekonomi Rakyat (LER) dan memberikan perhatian terhadap pengembangan kehidupan keagamaan serta menumbuh kembangkan budaya lokal.

**f. Misi**

Misi merupakan proses untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, adapun Misi Kabupaten Enrekang yang tercantum dalam Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Enrekang adalah :

1. Pilar pendukung perekonomian bagi pengembangan perekonomian Sulawesi Selatan melalui pengembangan berbagai komoditas unggulan, khususnya disektor pertanian.
2. Mengembangkan kerja sama kawasan dan keterkaitan fungsional antara daerah dengan tetap mengacu pada semangat kemandirian dan otonomi.

3. Mengembangkan implementasi pembangunan yang lebih menekankan pada pengembangan Kawasan timur Enrekang (KTE) dalam rangka mewujudkan keseimbangan pembangunan antara wilayah di kabupaten Enrekang.
4. Melakukan penataan tata ruang yang mampu memberikan peluang bagi terciptanya truktur ekonomi dan wilayah yang kuat sehingga memungkinkan munculnya interkonesitas inter dan antar wilayah.
5. Mengedepankan norma dan nilai-nilai budaya tradisional dan keagamaan seperti kejujuran, keadilan, keterbukan, saling menghormati, semangat gotong royong dan kerjasama, dalam berbagai aktifitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

**g. Tujuan**

Tujuan merupakan panjabaran dari misi dan bersifat operasional tentang apa yang akan dicapai. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

1. Komoditas unggulan Kabupaten Enrekang mampu memenuhi kebutuhan pasar lokal, regional, maupun untuk kebutuhan ekspor.
2. Pembangunan sumber daya yang menjadi pilar pendukung ekonomi kerakyatan.
3. Tercapainya kerjasama antar wilayah dan antar kawasan dalam kabupaten Enrekang.
4. Terwujudnya kerjasama antar Pemerintah Kabupaten enrekang dengan berbagai pihak.

5. Meningkatkan pengolahan potensi di kawasan Timur Enrekang.
6. Terwujudnya penataan wilayah/kawasan yang berdaya guna dan berhasil guna.
7. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan sosial.
8. Terwujudnya ketahanan budaya dan spiritual.
9. Terwujudnya pemerintahan yang baik partisipatif, transparan, dan akuntabel.
10. Terciptanya peraturan, keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

#### **h. Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, dapat terukur tentang apa yang akan dicapai atau dihasilkan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan pemerintahan Kabupaten enrekang yang bersifat spesifik, dapat di nilai, diukur, dan dapat dicapai dengan berorientasi pada hasil yang dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Sasaran Pemerintah Kabupaten enrekang sebagai berikut.

1. Meningkatnya daya saing komoditas unggulan Kabupaten Enrekang
2. Berkembangnya sistem perekonomian dan perdagangan.
3. Meningkatnya sarana dan prasarana fisik pemerintah
4. Meningkatnya sarana dan prasarana perhubungan ( transportasi dan postel).
5. Meningkatnya kemampuan pembiayaan.
6. Meningkatnya kualitas SDM pelaku ekonomi.
7. Terwujudnya pemberdayaan kecamatan dan desa/kelurahan.

8. Terjalannya kerjasama dengan pihak luar negeri dalam berbagai bidang pembangunan.
9. Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah provinsi dalam berbagai bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
10. Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam berbagai bidang pembangunan.
11. Meningkatnya kerjasama swasta dalam berbagai bidang.
12. Terwujudnya pemanfaatan lahan sesuai peruntukannya atau kesesuaian lahan.
13. Terciptanya pelestarian alam dan lingkungan hidup.
14. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan.
15. Meningkatnya ketahanan budaya dan kehidupan keagamaan.
16. Meningkatnya status sosial masyarakat.
17. Meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat.
18. Terwujudnya supremasi hukum atau penegakan hukum.
19. Meningkatnya kualitas aparatur
20. Meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan
21. Meningkatnya wawasan kebangsaan
22. Meningkatnya stabilitas keamanan dan keterlibatan dengan masyarakat.

## **2. Deskripsi Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang**

### **a. Kondisi Geografis**

Kecamatan Curio adalah salah satu kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Batas-batas wilayah Kecamatan Curio, sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tana Toraja
- Sebelah Barat : Kecamatan Malua dan Baraka

### **b. Luas Wilayah**

Luas Wilayah Kecamatan Curio adalah 178,51 km<sup>2</sup>, yang terdiri dari

11 Desa antara lain :

**Tabel 3 : Luas Desa Kecamatan Curio**

No	Desa	Luas(KM2)
1	Mekkalak	7,1
2	BuntuPema	7,6
3	Tallungura	20,25
4	Sanglempongan	22,36
5	Parombean	25,08
6	Curio	29,34
7	Pebaloran	16,88
8	BuntuBarana	25,32
9	Salassa	5,86
10	Sumbang	10,52
11	Mandalan	8,2
Jumlah		178,51

Sumber : Data Sekunder Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten

Enrekang 2014

### c. Keadaan Topografi

Kecamatan Curio secara umum mempunyai wilayah Topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 740 – 1.098 m dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara

umum keadaan topografi wilayah-wilayah didominasi oleh bukit-bukit atau gunung-gunung yang sangat terjal (55-90°).

#### **d. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk Kecamatan Curio 14.533 Jiwa yang terbagi dalam jumlah laki-laki 7.335 jiwa dan jumlah perempuan 7.198 jiwa,

## **2. Karakteristik Informan**

Dalam pembahasan ini penulis akan membahas data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dilapangan yang terdiri dari beberapa pernyataan informan yang dihasilkan setelah melakukan, obserfasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan dibahas secara berurutan.

Pada bagian pertama penulis membahas mengenai karakteristik atau identitas dari informan yang masing-masing informan antara lain : Pemerintah Daerah Kecamatan, Kepala Desa Parombean, Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang, serta Masyarakat yang menjadi korban bencana tanah longsor.

Dilanjutkan penulis akan membahas bagaimana peran Pemerintah Daerah Kecamatan dan Desa, serta peran Ketua Badan Penanggulangan Badan Daerah (BPBD), dan peran Masyarakat dalam penanganan bencana alam tanah longsor serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam penanggulangan bencana alam tanah longsor di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

Tabel 4 : Informan Penelitian

NO	Asal informan	Jumlah
1	Kepala BPBD	1 orang
2	Pemerintah Kecamatan Curio	1 orang
3	Pemerintah desa parombean	1 orang
4	Masyarakat korban bencana	5 orang
5	Tokoh masyarakat	1 orang

Sumber : Diolah oleh penulis

## **B. Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Longsor Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang**

### **1. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana longsor di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang**

Pemerintah daerah Kecamatan, serta Pemerintah Desa menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Secara khusus tanggung jawab itu dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pemerintah pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007). Tentu saja upaya-upaya pengurangan risiko bencana (PRB) mesti dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan demi ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana merupakan landasan wawancara kepada Pemerintah Daerah Kecamatan Curio.

Wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Curio tentang Kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak bencana longsor di Desa Parombean sebagai berikut.:

“Untuk melindungi masyarakat dari dampak bencana, kami pihak pemerintah terlebih dahulu mencari tau apa saja masalah-masalah yang berkaitan dengan bencana alam yang dapat mengancam keselamatan masyarakat sehingga pihak pemerintah dapat melakukan tindakan yang tepat sasaran” ( Hasil wawancara dengan SM 6 Januari 2017).

Informan melanjutkan terkait dengan tanggung jawab pemerintah kecamatan.

“Dalam menanggulangi bencana tanah longsor kami dari pihak pemerintah telah mengupayakan dengan serius penanganan tanah longsor ini. Banyaknya lokasi rawan bencana longsor membuat kami bekerja keras untuk berupaya menanggulangi bencana tanah longsor sedini mungkin. Kami juga berupaya menunjukkan kepada masyarakat tentang kinerja pemerintah terhadap permasalahan tanah longsor, agar masyarakat tidak bertanggung miring kepada pemerintah.” ( Hasil wawancara dengan SM 6 Januari 2017).

Berdasarkan keterangan salah satu pihak pemerintah diatas tentunya memberikan penjelasan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana alam tanah longsor. Penulis menyimpulkan bahwa pemerintah kecamatan dalam menanggulangi bencana alam berupaya semaksimal mungkin, dengan melakukan penanggulangan sedini mungkin, bekerja secara optimal dan efisien.

Wawancara dengan Pemerintah Kecamatan tentang Kemampuan Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dari dampak bencana longsor di desa Parombean sebagai berikut.

“ Kami dari pemerintah mengutamakan bantuan kebutuhan korban tanah longsor, seperti bantuan berupa makanan, air bersih, pakaian, dan menyediakan obat-obatan yang biasanya diutus oleh tim kami” ( Hasil wawancara dengan SM 6 januari 2017).

Informan melanjutkan:

“ Untuk bantuan seperti pembenahan rumah korban pasca tanah longsor kami masih perlu rapatkan bersama jajaran pemerintah Kabupaten Enrekang.” ( Hasil wawancara dengan SM 6 Januari 2017).

Berdasarkan keterangan salah satu pihak pemerintah diatas tentunya memberikan penjelasan sejauh mana kemampuan pemerintah dalam membantu korban bencana alam tanah longsor di Kecamatan Curio. Penulis menyimpulkan bahwa pemerintah dalam membantu korban bencana alam memberikan bantuan berupa sandang pangan dan obat-obatan, dengan demikian pemerintah mengutamakan bantuan berupa siap konsumsi dan pakai.

Wawancara berikutnya dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang mengenai perlindungan terhadap korban bencana alam tanah longsor di Kecamatan Curio sebagai berikut.:

“ Untuk menanggulangi korban bencana tanah longsor, kami berupaya menyediakan pertolongan seperti tandu, penyediaan obat atau P3K, mendirikan tenda-tenda darurat. kalau untuk penyediaan konsumsi kami tidak ada, dalam artian bencana alam kan merupakan bencana yang sulit dipredikisi, berbeda dengan kecelakaan-kecelakaan yang korbannya ditangani oleh rumah sakit. kalau misalkan tim menyediakan bahan makanan di khawatirkan makan tersebut akan kadaluarsa.” (Hasil wawancara dengan BM 9 februari 2017).

Informan kemudian melanjutkan :

“ yang biasa kami lakukan adalah, ketika terjadi bencana bagaimana korban ini dapat segera mungkin ditolong, misalkan untuk korban yang luka parah dan membutuhkan pertolongan dokter kami akan segera mungkin mengangkat korban dan membawa korban kerumah sakit.” ( Hasil wawancara dengan BM 9 februari 2017).

Berdasarkan keterangan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang memberikan penjelasan tentang tindakan BPBD

Enrekang dalam menanggulangi bencana alam tanah longsor di Kecamatan Curio. Penulis menyimpulkan bahwa tugas serta peran dalam menanggulangi bencana alam tanah longsor dengan mengutamakan keselamatan penduduk, mengupayakan memberikan bantuan secepat mungkin.

Wawancara dengan Pemerintah Desa Parombean Kecamatan Curio tentang kerugian yang diakibatkan bencana tanah longsor terhadap Pemerintah Daerah sebagai berikut.:

” Kerugian yang diakibatkan bencana tanah longsor dipihak pemerintah biasanya terjadi jika putusnya jalan yang membuat hasil bumi didesa lain susah untuk dipasarkan ke pasar curio atau kecamatan lain dan terputusnya stok kebutuhan masyarakat dan terkendalanya pekerjaan kantor karena jalan tak bisa diawasi” ( Hasil wawancara dengan RM 28 Januari 2017).

Berdasarkan keterangan salah satu pihak pemerintah diatas tentunya memberikan penjelasan tentang kerugian pemerintah dari dampak bencana alam tanah longsor di Kecamatan Curio. Penulis menyimpulkan bahwa rusaknya akses sarana prasarana seperti longsor yang menutupi jalan poros membuat prekonomian pemerintah dan masyarakat terganggu yang berdampak memberikan kerugian.

Menyikapi penuturan informan dari pihak pemerintah Kecamatan penulis melakukan penelitian kepada masyarakat korban bencana longsor di Desa Parombean. Sebagaimana wawancara dengan masyarakat korban bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Parombean tentang upaya yang dilakukan Pemerintah dalam memberikan bantuan terhadap korban bencana longsor sebagai berikut.:

” Upaya yang dilakukan pemerintah terhadap kami korban tanah longsor, pemerintah memebrikan bantuan berupa makanan seperti, beras, indomie, air dos, telur, gula,kopi ada juga pakaian, sarung, ada seragam sekolah bagi anak kami. kalau untuk tempat tinggal, kami korban bencana tanah longsor, untuk sementara tinggal di rumah keluarga.” ( Hasil wawancara dengan RJ 23 february 2017).

Hasil wawancara lainnya dengan informan masyarakat korban bencana alam tanah longsor di Kabupaten Enrekang sebagai berikut :

“Saya juga berharap kepada pemerintah kabupaten enrekang kalau bisa memberikan bantuan, berupa uang atau bahan bangunan supaya kami bisa kembali memperbaiki rumah kami yang roboh atau rusak terkena dampak bencana alam.” ( Hasil wawancara dengan LH 23 february 2017).

Berdasarkan keterangan dua informan dari pihak masyarakat di Desa Parombean mengenai bantuan yang diberikan Pemerintah Daerah terhadap korban bencana tanah longsor. Penulis berpendapat bahwa Pemerintah Daerah telah memberikan bantuan siap pakai dan siap konsumsi. Adapun yang diharapkan masyarakat lainnya kepada pihak pemerintahan yaitu, memberikan bantuan berupa dana atau berupa bahan baku bangunan yang kemudian digunakan untuk membenahi rumah yang rusak agar bisa kembali dihuni secepat mungkin dan dari penuturan masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa respon masyarakat terhadap pemerintah sudah berjalan baik.

## **2. Pengalokasian anggaran bencana alam tanah longsor di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang**

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang salah satunya meliputi pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang memadai tertulis dalam Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU 24/2007).

Berdasarkan uraian singkat diatas yang berkaitan dengan anggaran bencana merupakan landasan wawancara kepada Pemerintah Daerah.

Wawancara dengan Pemerintah Kecamatan tentang pengalokasian anggaran bencana longsor di Kabupaten Enrekang sebagai berikut:

“ Alokasi dana untuk penanggulangan bencana alam sudah ada tapi belum mencukupi, kami juga sudah mengajukan permohonan kepada pemerintah Kabupaten, berupa permohonan penambahan anggaran dana dan pengadaan kendaraan alat berat” ( Hasil wawancara dengan SM 6 januari 2017).

Berdasarkan keterangan salah satu pihak pemerintah diatas memberikan penjelasan tentang pengalokasian anggaran dana. Penulis menyimpulkan bahwa pengalokasian anggaran dana yang dianggarkan oleh pemerintah daerah kabupaten enrekang sejauh ini belum mencukupi.

Hal ini juga sama dengan yang diungkapkan Ketua Dinas BPBD Enrekang sewaktu peneliti mengantarkan surat penelitian dan melakukan perbincangan singkat di kantor BPBD Enrekang.

Wawancara dengan Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang tentang pengalokasian anggaran bencana longsor di Kabupaten Enrekang sebagai berikut.:

“ Nominal anggaran bencana daerah di Kabupaten Enrekang untuk anggaran penanggulangan bencana alam satu milyar pertahun. dana tersebut terbagi untuk setiap bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kebakaran, dan angin topan”. ( Hasil wawancara dengan BM 9 februari 2017).

Sesuai pernyataan ketua badan penanggulangan bencana daerah kabupaten enrekang diatas, dapat diketahui berapa jumlah anggaran penanggulangan bencana daerah yang dikelola Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) anggaran tahun 2016 yang digunakan dalam menangani bencana alam di Kabupaten Enrekang, Ini tentunya sangat sesuai dengan prinsip kerja Manajemen Bencana yang terdapat di Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu prinsip praktis seperti : cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan akuntabilitas kemitraan dan pemberdayaan.

Wawancara berikutnya dengan Kepala Desa Parombean mengenai anggaran dana dari Pemerintah Kabupaten Sebagai berikut.

“ Nominal anggaran bencana yang dikelola dalam penanganan bencana tanah longsor ialah 232,123.000 yang kebanyakan berasal dari para donatur sedangkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk anggaran sangat kurang”. ( Hasil wawancara dengan RM 28 Januari 2017).

Sesuai pernyataan kepala desa diatas, dapat diketahui berapa jumlah anggaran penanggulangan bencana yang dikelola oleh pemerintah desa dalam menangani bencana tersebut.

Hal diatas menurut peneliti sangatlah bagus karena selaku pengayom dan pelindung dari masyarakat pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam hal ini selalu berupaya mengalokasikan anggaran kepada setiap bencana yang terjadi di daerahnya meski dengan kondisi yang kurang maksimal, agar setiap bencana yang terjadi tidak terlalu membebani para korban bencana.

Menyikapi pernyataan dari pihak pemerintah mengenai anggaran bencana alam, penulis melakukan penelitian kepada masyarakat korban bencana alam untuk mengetahui anggaran yang telah pemerintah daerah keluarkan dalam menganggarkan dana kepada masyarakat korban bencana sebagai berikut :

“ Anggaran dana pernah kami terima, dana tersebut digunakan untuk memperbaiki bangunan posyandu desa yang rusak karena tanah tempat membangun longsor .” ( Hasil wawancara dengan SF 23 februari 2017).

Dari hasil wawancara dengan informan KM tokoh masyarakat Parombean diatas dapat kita ketahui bahwa Pemerintah Daerah pernah mengalokasikan anggaran dana kepada masyarakat untuk dipergunakan membenahi posyandu desa yang mengalami kerusakan pasca longsor terjadi.

Wawancara berikutnya dengan masyarakat korban bencana alam mengenai pengalokasian anggaran dana bencana sebagai berikut :

“ Bantuan anggaran berupa uang langsung untuk membenahi bangunan saya yang rusak karena longsor dari pihak pemerintah tidak ada.” ( Hasil wawancara dengan MT 23 februari 2017).

Dari hasil wawancara dengan dua informan diatas dapat kita ketahui bahwa pemerintah daerah dalam menganggarkan dana bencana alam lebih kepada keperluan perbaikan bangunan umum, sedangkan untuk anggaran dana secara peribadi kepada korban dengan tegas informan menyatakan tidak menerima.

### **3. Pemulihan kondisi lokasi bencana alam tanah longsor di Kabupaten Enrekang**

BPBD Kabupaten Enrekang dibentuk berdasarkan Perda No.02 tahun 2010, tanggal 1 Oktober 2010,dan Pelantikan Kepala Badan BPBD tanggal 28 Oktober 2010, merupakan Instansi Pemeritah Daerah yang melakukan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bertujuan “ Menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari

ancaman, resiko dan dampak bencana.(Pasal 2 PP No.21 tahun 2010, Penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Seperti penjelasan yang berkaitan dalam manajemen pemulihan pascabencana, yang menjelaskan bahwa pemulihan merupakan awal upaya pembangunan kembali dan menjadi bagian dari pembangunan pada umumnya yang dilakukan melalui rehabilitasi dan rekontruksi. Rehabilitasi dapat diartikan sebagai segala upaya perbaikan untuk mengembalikan fungsi secara minimal terhadap sarana, parasarana dan fasilitas umum yang rusak akibat bencana. Dengan pengembalian fungsi tersebut, layanan publik/masyarakat dapat dilaksanakan. Sasaran utamanya adalah normalisasi/berjalannya secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelumnya terjadinya bencana. Sedangkan rekontruksi dapat diartikan sebagai segala upaya pembangunan kembali sarana, prasarana dan fasilitas umum. Tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya dengan sasaran utamanya tumbuh kembangkannya kegiatan sosial, ekonomo dan budaya serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan (Nurjanah,2010.:47).

Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang tentang kemampuan Ketua BPBD Enrekang dalam pemulihan lokasi bencana alam sebagai berikut.:

“ Saya yang diberi amanah sebagai ketua BPBD Kabupaten enrekang terlebih dahulu memahami betul akan peran dan tanggung jawab memimpin mekanisme organisasi agar tetap bersinergi dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi di Kabupaten Enrekang.”( Hasil wawancara dengan BM 9 Februari 2017).

Berdasarkan pernyataan informan diatas dapat diklasifikasi bahwa posisinya sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan utama kepada masyarakat, kemudian mengontrol struktur BPBD Kabupaten Enrekang dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing BPBD Kabupaten Enrekang.

Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang mengenai hubungan kerja sama dalam pemulihan lokasi bencana sebagai berikut :

“Saat terjadi bencana, kami dengan instansi/dinas terkait seperti SAR, PMI, BABINSA, Dinsos, Dinkes, dan seluruh instansi/dinas terkait langsung menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan perencanaan, bahkan kelompok peduli lingkungan seperti Mapala ikut berpartisipasi untuk bantuan dalam mensuplai logistik sesuai kebutuhan korban bencana dilokasi longsor.” ( Hasil wawancara dengan BM 9 Februari 2017).

Berdasarkan pernyataan Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) diatas memberikan keterangan bahwa ketika berada di lokasi pemerintah saling bekerjasama dengan instansi/dinas terkait untuk membantu proses rehabilitasi para korban yang terkena dampak bencana longsor agar mereka langsung diberikan bantuan.

Wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Curio tentang penanggulangan bencana tanah longsor, sebagai berikut :

“Yang bisa diselesaikan secara langsung yang menggunakan tenaga manusia kita selesaikan dengan menggunakan alat sederhana saja seperti cangkul, dan skup, kita juga dibantu oleh beberapa instansi, akan tetapi dengan kerusakan yang sudah parah dan tidak bisa ditangani dengan peralatan warga seadanya maka harus menurunkan alat berat dari dinas PU”. (Wawancara SM, 6 Januari 2017)

Dari penuturan diatas mengemukakan bahwa dalam melakukan eksekusi di wilayah yang terkena longsor ada bermacam-macam kriteria kerusakan yang ditimbulkan oleh longsor. Untuk kerusakan ringan, penangannya juga bisa diselesaikan hanya dengan menggunakan tenaga manusia untuk mengevaluasi wilayah yang terkena bencana, ada juga yang harus menggunakan alat berat, karena tidak memungkinkan untuk memakai alat seadanya sehingga membutuhkan tenaga ahli demi membantu proses penanganan korban.

seperti yang diungkapkan oleh Tokoh Masyarakat sebagai berikut :

“Upaya penanganan banjir yang dilakukan adalah penguatan tebing dan memasang beronjong berupa beton. Kita juga harus membuat perencanaan dulu dan kesiapsiagaan untuk penanganan sementara bila terjadi bencana”. (Wawancara dengan TI, 23 Februari 2017)

Penuturan diatas, memberikan pernyataan bahwa untuk memperbaiki daerah yang terkena longsor, yaitu khusus didusun yang paling parah. Langkah yang diambil adalah penguatan tebing dan memasang beronjong berupa beton, beronjong merupakan bangunan panjang yang menyerupai pondasi bangunan rumah, akan tetapi beronjong berfungsi sebagai penahan tanah sepanjang yang terdampak. Bahan dari beronjong sendiri adalah, semen, batu sungai, dan kawat sebagai lapisan luar agar pondasi-pondasi ini tidak cepat rusak.

#### **4. Pengurangan resiko lokasi bencana tanah longsor di Kabupaten Enrekang**

Peringatan dini (*Early Warning*) adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Mitigasi (*Mitigation*) adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Risiko bencana (*Risk Disaster*) adalah potensi kerugian yang di timbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

Wacana diatas merupakan acuan wawancara dengan informan dalam melakukan pemulihan kondisi lokasi bencana alam tanah longsor di Kecamatan Curio. Sebagaimana wawancara dengan Pemerintah Kecamatan Curio mengenai pemulihan lokasi bencana dengan melihat tabel sebagai berikut.:

Tabel 5 : data disaster governance

No	Instansi	Tindakan
1	Pemda Kabupaten	Koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Curio dan Instansi terkait.
2	Kecamatan	Koordinasi dengan oemerintah kabuapaten kabupaten dan desa serta masyarakat
3	Desa	Melakukan pendataan dan sosialisasi kepada masyarakat
4	Masyarakat	Melaksanakan setiap yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengyurangi resiko terjadinya bencana longsor

*Sumber : kantor desa parombean*

“ Untuk melakukan pengurangan resiko lokasi bencana pemerintah Kecamatan Curio telah melakukan beberapa program dan salah satunya adalah membuat dinding pondasi penahan tanah longsor serta drainase yang lebih besar.” (Hasil wawancara dengan SM 6 januari 2017).

Berdasarkan keterangan salah satu pihak Pemerintah Daerah diatas tentunya memberikan penjelasan tentang langkah pemerintah dalam melakukan pengurangan resiko lokasi bencana longsor.

Dalam mengurangi resiko bencana, tidak cukup jika hanya dilakukan oleh suatu kelompok saja. Namun juga dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan proaktif dari berbagai pihak, baik itu pada pemerintah, kelompok atau organisasi masyarakat, pengusaha dan masyarakat sipil. Selain itu, dibutuhkan pula manajemen bencana yang baik dari kerjasama banyak pihak tersebut. Jika kerjasamanya berjalan dengan baik, maka manajemen bencananya juga akan berjalan dengan baik dan sukses mengurangi resiko bencana (Johan Minnie,2010).

Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang mengenai pengurangan lokasi bencana sebagai berikut :

“ Untuk mengurangi bencana alam kita mempunyai program fisik dan program non fisik, program fisik berupa bangunan anti longsor, program non fisik berupa sosialisasi anti bencana alam. Dan itu sudah sebagian berjalan.” (Hasil wawancara dengan BM 9 Februari 2017).

Berdasarkan penuturan ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang diatas dapat diketahui bahwa telah ada program pengurangan bencana alam dibuat dan sebagian program tersebut telah berjalan.

Sesuai dengan pemaparan informan diatas memang sudah dilakukan, tapi yang saya sampaikan diatas bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini BPBD belum maksimal, karena tidak selamanya BPBD tidak selamanya berada pada lokasi bencana, harusnya hal demikian dilakukan oleh

pemerintah kecamatan yang notabeneanya selalu dekat dengan rakyat, dan yang paling pertama terjun ke lokasi bencana apabila terjadi bencana alam.

Wawancara berikutnya dengan Kepala Desa Parombean mengenai pengurangan lokasi bencana sebagai berikut.:

“Saya yang bertugas sebagai Kepala Desa Parombean mempunyai peran dalam memonitoring lokasi yang rawan bencana tanah longsor, bila musim hujan tiba sering kita terjun lapangan mengecek daerah mana saja yang rawan bencana terjadinya tanah longsor, itupun bukan hanya lokasi tanah longsor saja yang kita awasi, misalkan tiba-tiba ada kebakaran sesegera mungkin kita akan kelokasi.” ( Hasil wawancara dengan RM 28 Januari 2017).

Berdasarkan keterangan Kepala Desa Parombean memberikan penjelasan tentang perannya dalam mengurangi bencana alam tanah longsor di desa Parombean. Penulis menyimpulkan bahwa informan tersebut sudah tepat jika melakukan sebuah monitoring kelokasi bencana , karena dengan hal tersebut barulah sebuah perencanaan matang dapat dibuat untuk mengurangi bencana alam.

Wawancara berikutnya adalah peran masyarakat dalam membantu pemerintah dalam mengurangi bencana alam tanah longsor di Kabupaten Enrekang. Sebagaimana wawancara dengan Masyarakat korban bencana tanah longsor yang terjadi didesa Parombean tentang peran serta masyarakat dalam pengurangan resiko bencana longsor sebagai berikut.:

“Kami mengikuti program pemerintah misalkan tentang penghijauan, menanam pohon yang bisa menahan agar mengurangi dampak longsor. Melaporkan sesegera mungkin misalkan ada tanda-tanda tanah yang akan longsor kepada instansi yang terkait, serta bergotong royong dalam kegiatan pemerintah dalam menangani bencana longsor. ( Hasil wawancara dengan SF 23 Februari 2017).

Informan berikutnya yang juga ikut :

“Saya beserta beberapa warga lain sudah mendirikan sebuah komunitas tentang penanggulangan bencana alam yaitu tagana, yang melibatkan masyarakat sekitar lokasi/desa.” ( Hasil wawancara dengan MT 23 Februari 2017).

Berdasarkan keterangan dua informan masyarakat di Kecamatan Curio mengenai peran serta masyarakat dalam menanggulangi bencana alam yang terjadi di Kecamatan Curio. Dari penuturan diatas menjelaskan bahwa masyarakat telah menerima dengan baik pengetahuan dan himbauan yang disosialisasikan oleh pemerintah sehingga masyarakat telah mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi, masyarakat juga mampu membuat kelompok yang berperan dalam mengurangi bencana alam. Ini menindikasikan bahwa peran serta masyarakat telah aktif dalam melaksanakan penanggulangan bencana tanah longsor dikemudian hari. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena banjir (Nurjanah, 2010: 99).

### **C. Faktor Pendukung Dan Penghambat Pemerintah Daerah Untuk Menanggulangi Bencana Alam Tanah Longsor Di Kabupaten Enrekang**

#### **1. Faktor Pendukung**

##### **1.a Terjalannya Kerja Sama Antara Berbagai Pihak**

Dalam menanggulangi bencana alam baik yang terjadi maupun yang belum terjadi tentunya ada beberapa langkah yang perlu pemerintah lakukan, hal ini bertujuan untuk menunjang keberhasilan pemerintah dan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana alam. Adapun kaitannya dengan faktor pendukung Pemerintah Daerah Kecamatan dalam menanggulangi bencana alam tanah longsor di Desa Parombean.

Wawancara dengan Pemerintah Kecamatan mengenai faktor Pendukung Pemerintah Kecamatan dalam menanggulangi bencana alam tanah longsor di Kecamatan Curio sebagai berikut.:

“Pendukung pemerintah Kecamatan untuk penanggulangan bencana, sejauh ini baik dari Pemerintah daerah , Dinas, Istansi, dan Masyarakat kita sama-sama bekerja dalam menanggulangi musibah alam. Kemudian pemerintah juga menjalankan program tanggap darurat bencana alam.” ( Hasil wawancara dengan SM 6 Januari 2017).

Berdasarkan keterangan salah satu pihak Pemerintah Kecamatan diatas tentunya memberikan penjelasan tentang faktor pendukung Pemerintah dalam menanggulangi bencana alam tanah longsor di Kecamatan Curio. Penulis dapat menyimpulkan bahwa kerjasama yang baik dapat mendukung berjalannya suatu program yang telah dirancang oleh pihak pemerintah dalam penanggulangan bencana.

### **1.b Program Penanggulangan Bencana Alam**

Wawancara berikutnya dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang mengenai faktor pendukung penanggulangan bencana alam tanah longsor sebagai berikut.:

Wawancara dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang tentang faktor pendukung terjadinya bencana tanah longsor.

” Yang mendukung dalam penanggulangan bencana tanah longsor di Kecamatan Curio selama ini, kami selaku Dinas BPBD berupaya memeberikan sosialisasi kepada masyarakat, terus berupaya menambah wawasan masarakat tentang bahaya rawan tanah longsor. Mengingat lokasi ini adalah hampir sepenuhnya daerah pegunungan. Jadi untuk mendukung penanggulangan tanah longsor yang kami fokuskan adalah memperbaiki SDM.” ( Hasil wawancara dengan BM Februari 2017).

Berdasarkan wawancara diatas, bahwa Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang berfokus pada perbaikan sumber daya manusia (SDM) sebagai faktor pendukung penanggulangan bencana alam tanah longsor. Penulis menyimpulkan apabila sumber daya manusia dapat diperbaiki dan masing-masing mengambil peran aktif dalam menanggulangi bencana alam, hal ini bisa menjadi contoh yang baik bagi daerah lainnya.

### **1.c Pendampingan**

Wawancara berikutnya dengan Kepala Desa Parombean tentang faktor pendukung dalam menanggulangi bencana tanah longsor sebagai berikut.:

“ Faktor pendukung dalam menanggulangi bencana tanah longsor, saya bersama teman yang lain sebagai yang berhadapan langsung kelapangan berupaya mendampingi masyarakat dengan bersama-sama menjalankan program-program yang diberikan oleh atasan kami. Kami juga sudah memberikan beberapa tanda-tanda akan rawan longsor, khususnya ditebing” ( Hasil wawancara dengan RM 28 januari 2017).

Berdasarkan semua pernyataan ke Tiga (3) informan dari pihak pemerintah diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung Pemerintah dalam menanggulangi bencana alam tanah longsor di Kecamatan Curio adalah :

(a) Terjalinya kerjasama yang baik dari pihak Pemerintah Daerah, Dinas BPBD, Istansi terkait, dan Masyarakat. (b) Adanya program yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. (c) Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM). (d) Pendampingan.

### **1.d Pemberdayaan Masyarakat Setempat**

Wawancara dengan korban bencana terkait dengan keikutsertaan dalam penanganan bencana:

“ Saya membantu pemerintah tidak banyak, cuma berusaha dengan menjalankan program yang pemerintah berikan, dikebun kita sudah tanam rumput gaja agar tanah pada saat musim hujan tidak longsor serta tidak membuka lahan sembarangan di daerah pegunungan.” (Hasil wawancara dengan RJ 23 Februari 2017).

Wawancara berikutnya dengan masyarakat Kecamatan Curio dalam keikutsertaan dengan Pemerintah menanggulangi bencana alam tanah longsor sebagai berikut.:

“ Kalau terjadi bencana alam berupa tanah longsor, saya melapor ke pihak pemerintah daerah, bukan hanya saat bencana terjadi saja baru saya melapor, misalnya jika terdapat tanda-tanda tanah yang akan longsor saya juga laporkan.” (Hasil wawancara dengan TI 23 Februari 2017).

Hasil wawancara dari dua (2) informan di pihak masyarakat penulis menyimpulkan bahwa peran dan partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah daerah menanggulangi bencana alam tanah longsor.

Sebagaimana diketahui bahwa dengan melakukan penanaman tanaman rumput dan tidak membuka lahan sembarangan di daerah rawan dapat menahan pencegah tanah longsor masyarakat tersebut telah berhasil membantu mengsucceskan salah satu program pemerintah yaitu program penghijauan, dan dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat secara langsung kepada pihak pemerintah daerah dapat memberikan gambaran kepada pemerintah daerah, paling tidaknya sangat membantu pemerintah daerah dan lapisan yang terkait dalam mengambil tindakan mengenai cara penanganan bencana alam baik yang terjadi maupun yang belum terjadi.

## **2. Faktor Penghambat**

### **2.a Kurangnya Alokasi Anggaran Penanggulangan Bencana Alam**

Dalam menanggulangi bencana alam baik yang terjadi maupun yang belum terjadi tentunya ada beberapa beberapa faktor yang bisa saja menjadi penghambat kinerja pemerintah dan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana alam. Berhubungan dengan faktor penghambat Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana tanah longsor di Kecamatan Curio sebagai berikut.:

“ Terus terang kendala Pemerintah dalam menanggulangi bencana tanah longsor itu kurangnya anggaran dana untuk membeli alat fasilitas bencana alam.” ( Hasil wawancara dengan SM 6 Januari 2017).

Informan kemudian menambahkan :

” Seperti kita ketahui bersama bahwa kondisi geografis kabupaten enrekang adalah pegunungan, kondisi tanah yang miring dapat memicu rentangnya terjadi longsor. Kemudian tekstur tanah yang banyak mengandung bebatuan menyulitkan pemerintah untuk menggali dan membuat parit-parit atau saluran irigasi yang dapat memperlancar air hujan untuk segera mengalir ke induk sungai atau anak sungai terdekat.” ( Hasil wawancara dengan SM 6 Januari 2017).

Berdasarkan keterangan salah satu pihak pemerintah diatas tentunya memberikan penjelasan tentang faktor penghambat dalam menangani bencana alam tanah longsor di Kabupaten Enrekang. Penulis menyimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi Pemerintah dalam menanggulangi bencana alam adalah dibagian penganggaran .

Selanjutnya wawancara dengan Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencan Kabupaten Enrekang,

“Anggaran yang disediakan Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang selama ini belum sepenuhnya mencukupi. Mengingat hampir setiap tahun, terutama saat musim penghujan sering terjadi longsor. Dana tersebut juga tidak semata-mata hanya difokuskan kepada penanggulangan tanah longsor, melainkan dana tersebut juga masih dibagi untuk keperluan bencana lainnya” ( Hasil wawancara dengan BM 9 Februari 2017).

Pernyataan Informan diatas menjelaskan bahwa alokasi dan anggaran yang disediakan Pemerintah Kabupaten Enrekang untuk Dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang menjadi penghambat dalam menanggulangi terjadinya resiko bencana longsor di Kabupaten Enrekang, terutama bencana yang terjadi di desa parombean.

### **2.b Faktor Geologis**

Wawancara berikutnya dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekang tentang faktor penghambat penanggulangan bencana tanah longsor sebagai berikut.:

“Wilayah Kabupaten Enrekang 85 % merupakan daerah pegunungan dengan kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana tanah longsor yang cukup tinggi.” ( Hasil wawancara dengan BM 9 Februari 2017).

Dari Pernyataan informan dapat disimpulkan bahwa lokasi bencana di desa parombean kebanyakan dikelilingi oleh gunung, serta ladang persawahan warga.

### **2.c Rusaknya Akses Yang Diakibatkan Tanah Longsor**

Selanjutnya penulis melakukan penelitian kepada masyarakat korban bencana longsor yang terjadi di desa parombean. Adapun hasil wawancara sebagai berikut.:

“Pemerintah daerah memang telah membantu, tapi bantuan yang dilakukan lambat dan tidak maksimal, dari pihak pemerintah daerah meminta maaf kepada kami mengenai terlambatnya penanganan dikarenakan putusnya dua jembatan yang menjadi akses menuju lokasi bencana. (Hasil wawancara dengan LH 23 Februari 2017.)

Pernyataan yang sama juga ditegaskan oleh informan KM adapun pernyataannya sebagai berikut.:

“Iya benar ada dua jembatan putus, jembatan yang menghubungkan kecamatan curio dengan desa paromean tertimbun longsor, (Hasil wawancara dengan MT 23 Februari 2017.)

Berdasarkan pernyataan dua (2) informan diatas menjadi faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan penanganan. Penulis menyimpulkan bahwa putusnya jembatan menjadi kendala pemerintah dalam melakukan penanganan secepat mungkin.

Berdasarkan semua pernyataan informan diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam menanggulangi bencana alam tanah longsor di Kabupaten Enrekang adalah.: (a) Kurangnya anggaran dana. (b) Faktor geologis. (c) Minimnya fasilitas berupa alat yang dapat membantu penanganan bencana alam. (d) Rusaknya fasilitas umum.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang berkaitan dengan Kemampuan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Longsor Di Kecamatan Curio Kabupaten Enrekang.

1. Kemampuan pemerintah daerah Kecamatan yaitu,(a) Memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan cara memahami hal-hal yang berkaitan dengan bencana alam yang dapat membahayakan keselamatan masyarakatnya. (b) Pengalokasian anggaran bencana daerah dialokasikan pada penanggulangan bencana tanah longsor serta bencana lainnya. (c) Pemulihan lokasi bencana dengan mengutamakan perbaikan lokasi dan fasilitas yang menjadi kebutuhan umum baik masyarakat dan pemerintah daerah. (d) pengurangan resiko bencana alam dengan membuat program dan sosialisasi tanggap darurat bencana alam seperti bangunan pondasi penahan tanah longsor.
2. Faktor Pendukung Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam menanggulangi resiko bencana tanah longsor yakni, Terjalinya kerjasama yang baik dari pihak, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Dinas BPBD, Desa, Istansi terkait, dan Masyarakat. Adanya program yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pemberdayaan sumber daya manusia (SDM), dan Pendampingan. Faktor Penghambat

Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Enrekang dalam menanggulangi resiko bencana alam tanah longsor yakni. Kurangnya anggaran dana, Faktor geologis, Minimnya fasilitas berupa alat yang dapat membantu penanganan bencana alam, dan rusaknya fasilitas umum.

### **B. Saran**

1. Pemerintah Kecamatan dalam menanggulangi bencana alam tanah longsor, untuk menyediakan anggaran khusus yang digunakan untuk membeli beberapa fasilitas, seperti beko dan doser dengan melakukan koordinasi ke Pemerintah Kabupaten.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Enrekan agar tetap bersinergi dalam melakukan penanganggulangan bencana alam baik yang telah terjadi maupun yang belum terjadi.
3. Masyarakat harus tetap mengambil peran penting dalam menangani penanggulangan bencana alam tanah longsor. Dengan melakukan hal-hal yang dapat mencegah bencana tanah longsor.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amir, M Taufik. 2011. *Manajemen strategi*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Dwikorita Karnawati. 2005. *Bencana Alam Gerak Massa Tanah di Indonesia dan Upaya Penanggulangannya*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Moenir, 1998. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nandi. 2007. *Longsor*, FPIPS-UPI.
- Nurfadhilahtia, 2013.6 – *kapabilitas yang menjadi penilaian prestasi sebuah sistem politik* (online) <https://nurfadhilahtia94.wordpress.com/tag/6-kapabilitas-yang-menjadi-penilaian-prestasi-sebuah-sistem-politik/>. diakses 29 Oktober 2016).
- Nurjanna, Dkk. 2010. *Manajemen Bencana*. Alfabeta: Bandung.
- Pariipurno, Eko Teguh. 2011 *Panduan Pengelolaan Risiko Bencanaberbasis Komunitas (PRBBK)*, (online), ([https://www.academia.edu/5825822/Panduan\\_Pengelolaan\\_Risiko\\_Bencana\\_berbasis\\_Komunitas\\_PRBBK](https://www.academia.edu/5825822/Panduan_Pengelolaan_Risiko_Bencana_berbasis_Komunitas_PRBBK)) diakses 14 Maret 2016).
- Ramli, Soehetman. 2010. *Manajemen Bencana*. Dian Rakyat: Jakarta.
- Safiie, Kencana Inu. 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Mandar Maju : Bandung.
- Sampurno. 2010. *Manajemen Stratejik: menciptakan keunggulan bersaing yang berkelanjutan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Siagian, Sondang. 2001. *Filsafat Administrasi*. Gunung Agung: Jakarta.
- Soerjono, Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali: Jakarta.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. R&D. Alfabeta: Bandung.
- Supriyatna, Yayat. 2011. *Analisis Dampak Bencana terhadap Perekonomian Indonesia dengan Pendekatan SNSE.*, (online), diakses 29 Oktober 2016).

Thoha, Miftah. 1995. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.).

*Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

*Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

*Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.

## **RIWAYAT HIDUP**



**MUH TAUFIK ISMAIL.** Lahir di Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Juni 1992, sebagai anak Kelima dari 5 bersaudara, buah hati dari pasangan Ayah Ismail Matto dan Ibu Mallu. Penulis masuk sekolah dasar pada tahun 1998 di SD Negeri 132 Malele di Kabupataen Enrekang dan tamat pada tahun 2005, Tahun 2008 tamat SMP di sekolah SMP Negeri 3 Alla dan pada tahun 2011 tamat SMA di sekolah SMA Negeri 1 Alla. Selanjutnya pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan pada program Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar dan insyaallah selesai pada tahun 2018.